

KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai media pelaporan capaian atas rencana kerja tahun 2014. Laporan Kinerja ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi Rencana Strategik Inspektorat Kota Palembang, yang berisi pencapaian Visi dan Misi Inspektorat, tujuan, sasaran melalui Indikator Kinerja Sasaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut kiranya dapat lebih memotivasi seluruh pegawai dalam peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palembang ke depan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kami, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Palembang, Januari 2015

INSPEKTUR KOTA PALEMBANG

DRS. TOTO SUPARMAN, Ak
Pembina Utama Muda
NIP.19570814 198603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 2
1.3	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palembang..... 3
1.4	Sistematika..... 5
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	Umum 7
2.2	Penetapan Kinerja..... 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Analisa Program dan Kegiatan..... 19
3.2	Analisa Capaian Kinerja..... 25
3.3	Penggunaan Sumber Daya..... 34
3.4	Akuntabilitas Keuangan..... 35
BAB IV	PENUTUP
4.1	Kesimpulan..... 38
LAMPIRAN	
1.	Penetapan Kinerja
2.	Pencapaian Program dan Kegiatan
3.	Akuntabilitas Keuangan

IKTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis pencapaian strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman rumusan sasaran yang didukung indikator setingkat outcome. Pengukuran kinerja inspektorat diukur dengan 2 (dua) sasaran yang didukung dengan 12 indikator sasaran serta 4 (empat) program utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Palembang sebagian besar telah menunjukkan hasil optimal dengan 8 indikator kinerja telah mencapai target dan masih terdapat 4 indikator yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Sasaran strategik “*meningkatnya profesional aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna*”, dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan, capaian kinerjanya sebesar 125%.
 - b. Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu, capaian kinerjanya sebesar 133%.
2. Sasaran strategik “*terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di pemerintah kota Palembang*” dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase LHP yang disusun tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Persentase unit kerja dengan pelayanan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - f. Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP, belum dapat diukur.

- g. Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang, dengan capaian kinerja CC
- h. Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC, dengan capaian kinerja sebesar 64%
- i. Nilai PMPRB, dengan capaian kinerja B
- j. Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani, dengan capaian kinerja sebesar 100%

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance yang responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel hanya akan dapat dicapai apabila dalam pengelolaannya didasarkan pada manajemen kinerja, dimana kinerja tersebut sejatinya sejak direncanakan, dirumuskan, dicapai dan dipertanggungjawabkan berdasarkan suatu sistem penilaian yang terukur dan dapat dievaluasi kinerja capaiannya.

Dalam upaya merealisasikan sebuah tata pemerintah yang baik (*good governance*) dan *clean government* perlu adanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan kosekuen, yang dapat membawa implikasi nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Guna mewujudkan harapan dimaksud pemerintah kota Palembang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palembang periode 2013-2018, sebagai pedoman dan arah pembangunan dalam pencapaian *good governance* dan *clean goverment*.

Inspektorat Kota Palembang sebagai aparatur pengawas internal Pemerintah dalam rangka mendukung arah pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD telah diberikan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, bertanggung jawab kepada Walikota dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dalam Pelaksanaanya inspektorat Kota Palembang telah menyusun manajemen kinerja/perencanaan yang disusun sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja inspektorat melalui Rencana Strategis, Renca Kerja dan Penetapan kinerja. Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

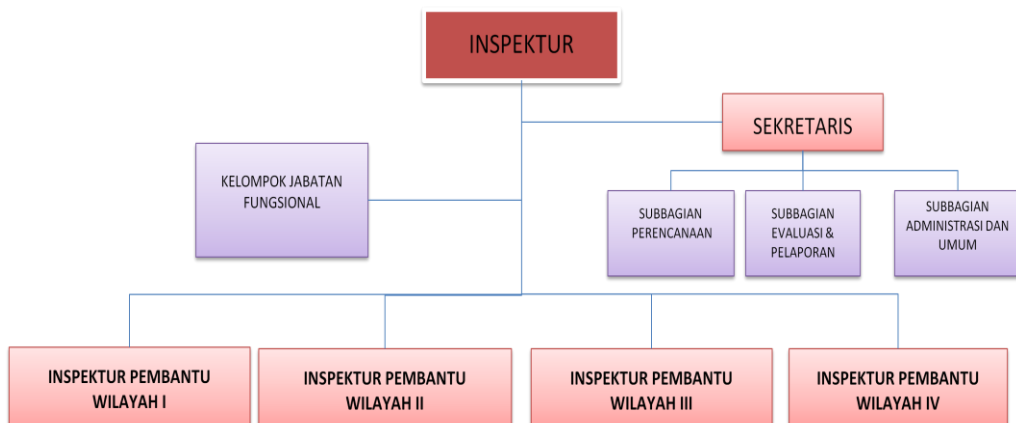
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Palembang mengalami perubahan, sejalan dengan kebutuhan terhadap suatu manajemen kinerja yang baik yaitu *structure follows Function*, Susunan Organisasi Inspektorat Kota Palembang terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD



1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Kota Palembang memiliki tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui pengendalian intern Pemerintah guna mencapai visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang yaitu Palembang EMAS 2018 dengan menjamin penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean goverment*) dan bebas dari korupsi.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Inspektorat Kota Palembang dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah , antara lain sebagai berikut :

- a. Implementasi SPIP secara menyeluruh pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- b. Peningkatan sistem dan pelaksanaan pengawasan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan pada unit kerja agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja.
- c. Mengoptimalkan kinerja birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya
- d. Penerapan tata pemerintahan yang diinternalisasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh pada unit kerja di lingkungan pemerintah.
- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pengawasan inspektorat Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan untuk dapat memperbaiki kinerja dan manajemen pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SPIP pada unit kerja melalui audit operasional
- c. Penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan yang konsisten.

- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan manajemen untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan dan sistem pengendalian dan evaluasi.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- f. Melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Inspektorat Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.1
Permasalahan dan Rencana Pengendalian

Aspek kajian	Kondisi saat Ini	Kondisi Seharusnya	Faktor yang mempengaruhi		Rencana Pengendalian
			Internal	eksternal	
Kuantitas Auditor/P2UPD dan SDM	Jumlah SDM sebanyak 45 orang dan yang telah ditetapkan sebagai JFA sebanyak 27 orang Auditor dan 5 orang P2UPD	Seharusnya SDM inspektorat sebanyak 73 orang dengan jumlah Auditor dan P2UPD sebanyak 48 orang		Masih rendahnya pemerataan pegawai khususnya di Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rekrutmen internal untuk kebutuhan pegawai Inspektorat. 2. mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi auditor dan P2UPD 3. Mengusulkan pegawai untuk ditetapkan sebagai Auditor/P2UPD
Kualitas Aparat Pengawasan	Sebagian besar aparatur pengawasan masih berada dalam level 1 (intial)	Seharusnya kapabilitas Aparatur Pengawasan pemerintah daerah minimal berada dalam level 2 (<i>infrastructure</i>)	Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan penjenjangan dan keahlian tertentu		Mengusulkan penambahan anggaran Inspektorat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 tahun 2008
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Kualitas masih belum memenuhi Standar audit sehingga dampak pemeriksaan masih belum efektif terlihat dari rendahnya jumlah temuan	LHP yang sesuai dengan standar audit sehingga mengurangi penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan	Belum pernah dilaksanakan bimtek penulisan dan penyusunan LHP yang efektif dan keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pemeriksaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan bimtek penyusunan LHP dan Bimtek Standar Audit, 2. Mengimplementasikan SIM-HP

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tugas dan fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

1. Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai *Consultant Partner*.
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan.
5. Peningkatan pelayanan Publik Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan Implementasi SPIP.
7. Pembinaan dan pengawasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Aspek kajian	Kondisi saat Ini	Kondisi Seharusnya	Faktor yang mempengaruhi		Rencana Pengendalian
			Internal	eksternal	
Kuantitas Auditor/P2UPD dan SDM	Jumlah SDM sebanyak 45 orang dan yang telah ditetapkan sebagai JFA sebanyak 27 orang Auditor dan 5 orang P2UPD	Seharusnya SDM inspektorat sebanyak 73 orang dengan jumlah Auditor dan P2UPD sebanyak 48 orang		Masih rendahnya pemerataan pegawai khususnya di Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan rekrutmen internal untuk kebutuhan pegawai Inspektorat. 5. mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi auditor dan P2UPD 6. Mengusulkan pegawai untuk ditetapkan sebagai Auditor/P2UPD
Kualitas Aparat Pengawasan	Sebagian besar aparatur pengawasan masih berada dalam level 1 (initial)	Seharusnya kapabilitas Aparatur Pengawasan pemerintan daerah minimal berada dalam level 2 (<i>infrastructure</i>)	Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan penjenjangan dan keahlian tertentu		Mengusulkan penambahan anggaran Inspektorat sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 tahun 2008
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Kualitas masih belum memenuhi Standar audit sehingga dampak pemeriksaan masih belum efektif terlihat dari rendahnya jumlah temuan	LHP yang sesuai dengan standar audit sehingga mengurangi penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan	Belum pernah dilaksanakan bimtek penulisan dan penyusunan LHP yang efektif dan keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pemeriksaan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengadakan bimtek penyusunan LHP dan Bimtek Standar Audit, 4. Mengimplementasikan SIM-HP

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan akuntabilitas ini menyajikan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Palembang selama Tahun 2014, dengan membandingkan antara target kinerja yang ada di dokumen penetapan kinerja 2014 dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2014 dan dengan menilai pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Inspektorat Kota Palembang, sehingga akan terlihat pencapaian program SKPD sebagai bagian dari pencapaian program utama pemerintah Kota Palembang.

Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tantangan dan permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II. PERJANJIAN KINERJA.

Bab ini menjelaskan secara ringkas uraian perjanjian kerja di tahun ini

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang pencapaian kinerja sasaran-sasaran Inspektorat Kota Palembang dengan pengungkapan hasil pengukuran kinerja. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran dan program serta hambatan dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah masing-masing indikator sasaran, realisasi pencapaian IKU, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 UMUM (VISI DAN MISI)

Sebagai langkah awal melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Kota Palembang, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Inspektorat Kota Palembang diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Kota Palembang diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

a. Visi dan Misi

Perumusan perencanaan strategis Inspektorat Kota Palembang diawali dengan penetapan visi yang merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi, baik pada saat penyusunannya, maupun pada kehidupan organisasi selanjutnya. Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang oleh para penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun Visi Inspektorat Kota Palembang yang hendak dicapai adalah :

**Aparatur Pengawas Internal yang profesional
Dalam Peningkatan Pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* guna Pencapaian Palembang EMAS 2018**

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan organisasi yang mendorong pencapaian Visi Walikota Palembang yaitu “**Palembang Emas 2018**”, dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan resiko dan proses “*Good Governance*” serta mendorong pelaksanaan “*Control Self Assesment (CSA)*” pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi risiko dan pengembangan sistem pengendalian internal.

Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Kota Palembang, Inspektorat kota Palembang memperhatikan dan memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, untuk itu Misi inspektorat ditetapkan :

Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna

Mendorong Peningkatan Pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palembang secara taat, hemat, efisien dan akuntabel.

Inspektorat Kota Palembang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palembang harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palembang yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Inspektorat Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 2.a.1

Tabel 2.a.1
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
 dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018
 Inspektorat Kota Palembang

VISI : Aparatur Pengawas Internal Yang Profesional dalam Mewujudkan <i>Good Governance dan Clean Government</i>							
MISI I : Menciptakan Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
1.1.	Meningkatnya Aparatur Pengawasan yang profesional, Efektif, Efesien dan Akuntabel dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1.1.1.	Terwujudnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna	1.1.1	Meperbanyak kesempatan kepada Pegawai mengikuti diklat Sertifikasi JFA dan JF2UPD	1.1.1.1	Meningkatkan kerja sama dengan BPKP dan Itjen Kemendagri
				1.1.2	Memperbanyak kesempatan kepada Pegawai mengikuti diklat dan pelatihan keahlian tertentu dengan instansi pembina baik internal maupun eksternal	1.2.1.1	Meningkatkan kerja sama dengan Instansi Pembina dibidang keahlian tertentu

MISI II : Mendorong Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
2.1.	Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang	2.1.1.	Terciptanya peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang	1.1.1	Melakukan Audit Operasional sesuai dengan PKPT	1.1.1.1	Melakukan audit Operasional untuk menilai tingkat keekonomisan, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan
						1.1.1.2	Melakukan Audit Operasional untuk menilai SPIP pada Unit kerja di lingkungan Pemkot Palembang
				1.1.2	Membangun SIM-HP	1.1.2.1	Mengimplementasikan SIM-HP Menertikan tata penyusunan LHP berikut PHP-I dengan SIM-HP
				1.1.3	Meningkatkan Koordinasi Hasil Pengawasan	1.1.3.1	Melakukan rapat koordinasi secara berkala
				1.1.4	Menginventarisir temuan sesuai dengan kode temuan	1.1.4.1	Melakukan inventarisir temuan hasil pengawasan
				1.1.5	Meningkatkan bimbingan teknis /asistensi penyusunan Laporan Keuangan	1.1.5.1	Meningkatkan kualitas reuiu Laporan Keuangan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
				1.1.6	melakukan Pengawasan pengelolaan aset	1.1.6.1	Pengawasan pengelolaan aset secara berkala (triwulan/semesteran)
				1.1.7	Meningkatkan bimbingan /asistensi penyusunan dokumen akuntabilitas	1.1.7.1	Pendampingan penyusunan dokumen akuntabilitas dengan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Secara Mendalam
				1.1.8	Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan Publik	1.1.8.1	Melakukan pengawasan pelayanan publik dengan menilai kelengkapan sarana dan prasarana dan etika perilaku pemberi layanan dan survey kepuasan masyarakat mengenai layanan.dan Penyeberluasan Informasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
				1.1.9	Peningkatan Integritas pengawasan		Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
				1.1.10	Melakukan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi di pemerintah Kota Palembang	1.1.10.1	Membentuk tim penilai terhadap tindak lanjut dan konsultan rencana perbaikan masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
						1.1.10.3	Mengkoordinasikan Tim Asesor untuk melakukan penilaian secara mandiri;
						1.1.10.4	Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada Pemerintah Kota Palembang
				1.1.11	Melakukan Audit Khusus dan Kasus	1.1.11.1	Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatkan koordinasi dan Pengawasan secara mendalam atas pengaduan masyarakat

b. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Misi Pertama mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

- 1.1. Meningkatkan Aparatur Pengawasan yang profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran:

- 1.1.1. Terwujudnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan:

- 2.1. Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Sasaran:

- 2.1.1. Terciptanya peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kota Palembang telah menetapkan kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun 2014. Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.1 Analisis Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kota Palembang dapat di lihat pada lampiran 2, selanjutnya analisis Program dan kegiatan pelaksanaan kegiatan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

(1) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Kegiatan Audit yang dilaksanakan :

- Pelaksanaan Audit Operasional Rutin pengawasan sebanyak 85 LHP, yang terdiri dari :
 - ✓ Audit Operasional atas DAK sebanyak 3 LHP
 - ✓ Audit Operasional SMA/K NEgeri sebanyak 29 LHP
 - ✓ Audit Operasional Kecamatan sebanyak 16 LHP
 - ✓ Audit Operasional SMP Negeri 3 LHP
 - ✓ Audit Operasional Perusahaan daerah sebanyak 2 LHP
(PT, SP2J Palembang dan PD. Pasar Palembang)

- ✓ Audit Operasional pada Dinas/Badan/Kantor 32 LHP

Dari Hasil audit operasional di atas ditemukan 15 temuan yang menimbulkan kerugian daerah dan Negara dengan nilai setor kerugian daerah sebesar Rp2.215.049.303,99 dan kerugian Negara sebesar Rp9.316.231,00.

- Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu sebanyak 84 LHP, yang terdiri dari :

- ✓ Aduit Tujuan Tertentu Dana BOS Sekolah 77 LHP

- ✓ Audit Tujuan tertentu atas permintaan 7 LHP

Dari Hasil Audit Tujuan tertentu ditemukan sebanyak 15 temuan yang menimbulkan Kerugian Daerah dan Negara yaitu kerugia daerah sebesar Rp1.696.831.864,00 dan Kerugian Negara Sebesar Rp138.910.824,00.

- Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemkot Palembang 1 LHP.

Sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang disampaikan kepada BPK RI, Inspektorat kota palembang telah melakukan reviu atas laporan keuangan dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sudah sesuai dengan SAP. Selain melakukan revieu, Inspektorat melalui Audit Operasional melakukan pembinaan langsung kepada SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan Daerah dan pada tahun 2014 BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

- **Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Palembang.**

Kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada 46 unit kerja dengan 47 LHP di lingkungan Pemkot Palembang, dengan Hasil Evaluasi sebagai berikut:

- Mendapatkan nilai/kategori scor B sebanyak 3 unit kerja.
- Mendapatkan nilai/kategori scor CC sebanyak 6 unit kerja.
- Mendapatkan nilai/kategori scor C sebanyak 16 unit kerja.

- Mendapatkan nilai/kategori skor D sebanyak 21 unit kerja.

Output maupun outcome pada kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah sebanyak 149 LHP sedangkan yang teralisasi sebanyak 217 LHP. Realisasi indikator kegiatan melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya perintah atasan langsung yaitu Walikota/sekretaris Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan tujuan tertentu Dana Bos Sekolah.

(2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2014, untuk penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, target kinerja indikator kinerja kegiatan sebanyak 36 LHP, Pengaduan masyarakat dan perintah atasan yang masuk ke Inspektorat Kota Palembang sebanyak 30 pengaduan. Dari pengaduan masyarakat tersebut di lakukan pemeriksaan khusus/Kasus dengan hasil sebanyak 16 pengaduan ditindaklanjuti secara intensif dan 14 Pengaduan diselesaikan secara koordinasi. Sehingga total realisasi LHP sebanyak 30 LHP

Belum memenuhinya target kinerja indikator kegiatan sebanyak 36 LHP/laporan tersebut dikarenakan jumlah pengaduan di tahun 2014 lebih rendah di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan telah adanya perbaikan/peningkatan kinerja aparatur.

(3) Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2014 yaitu pemantuan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 10 LHP, dari hasil pemantuan tindak lanjut dapat di jelaskan:

- Temuan aparat eksternal/BPK RI sebanyak 389 temuan dengan 853 Rekomendasi dengan nilai untuk setor ke kas Daerah sebesar Rp46.078.457.465,82. Dari hasil pemantauan tindak lanjut terhadap temuan tersebut Inspektorat Kota Palembang secara intensif mengkoordinasikan tindaklanjut dengan hasil sebanyak 656 Rekomendasi dengan nilai setor ke kas daerah sebesar Rp24.236.355.551,31 telah ditindaklanjuti secara tuntas, dan sebanyak 234 rekomendasi dengan nilai setor Rp21.207.790.893.01 masih dalam proses tindaklanjuti, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 77,82%.

- Inspektorat Kota Palembang telah melaksanakan audit di tahun 2014 dengan menerbitkan 241 LHP dengan Jumlah temuan audit yang mengakibatkan Kerugian Daerah dan Negara pada SKPD sebanyak 61 temuan dengan nilai setor kerugian daerah sebesar Rp3.911.811.167,00 dan kerugian Negara sebesar Rp148.227.055,00

Dari hasil temuan tersebut, Inspektorat Kota Palembang secara intensif melakukan pembinaan dan koordinasi kepada instansi terkait untuk pelaksanaan tindak lanjutnya dan sampai dengan Desember 2014 seluruh temuan telah ditindak lanjuti.

(4) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2014 :

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Inspektorat Kota Palembang telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah kota Palembang dengan hasil 62,24 berkategori B, unsur Reformasi birokrasi yang dilakukan penilaian, dengan hasil sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	% capaian
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	3,71	5,00	74,29%
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,5	5,00	50,00%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	0	6,00	0,00%
4	Penataan Tatalaksana	3,96	5,00	79,20%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	11,48	15,00	76,55%
6	Penguatan Akuntabilitas	3,38	6,00	56,33%
7	Penguatan Pengawasan	4,74	12,00	39,53%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	6,00	100,00%
	Sub Total Komponen Pengungkit	35,78	60,00	59,63%
B	Hasil			
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	8,26	20,00	41,30%
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	8,25	10,00	82,50%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	10,00	100,00%
	Sub Total Komponen Hasil	26,51	40,00	66,28%
	Indeks Reformasi Birokrasi	62,24	100,00	62,24%

- Pelaksanaan Penilaian Pelayanan publik.**

Untuk pelayanan publik inspektorat kota Palembang telah melakukan evaluasi pelayanan publik untuk mengetahui kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota

Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari sampel evaluasi pelayanan publik sebanyak 13 unit kerja dapat disampaikan bahwa :

No	Nama SKPD Pelayanan	Unit Pelayanan	Nilai Konversi (N x 10)
1	KPPT Kota Palembang	Proses Pelayanan Perijinan	970
2	Dinas Tata Kota	Pelayanan Ijin IMB	940
3	Dinas Sosial	Pelayanan Bidan Sosial	940
4	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	920
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelayanan Informasi Wisatawan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II	900
6	RSUD Palembang Bari	Pelayanan Pasien	890
7	Dinas Pendapatan Daerah	Pelayanan BPHTB dan PBB	890
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Murid	890
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelayanan Ijin Usaha Industri/Perindustrian	870
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil	860
11	Badan Lingkungan Hidup	Pelayanan Ijin Pembuangan Limbah	840
12	Dinas Perhubungan	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	840
13	Badan Kesbang dan Politik	Pelayanan Verifikasi Keberadaan Parpol dan LSM	820

Zona Merah atau kepatuhan rendah (0-500); menggambarkan kepatuhan yang rendah.
 Zona Kuning atau kepatuhan sedang (5001-800); menggambarkan kepatuhan yang rendah.
 Zona Hijau atau kepatuhan tinggi (801-100); menggambarkan kepatuhan yang rendah.

Dari hasil evaluasi, 13 unit kerja memiliki kepatuhan yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009.

Belum memenuhinya target kegiatan ini dikarenakan 2 kegiatan yaitu kegiatan LP2P dan Evaluasi SPIP tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya jumlah SDM.

2) Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur.

(1) Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi dan profesional aparatur pengawasan melalui :

- In house training/PKS terkait pelaksanaan pengawasan dan pelatihan kilat bagi seluruh pegawai yang diselenggarakan setiap bulan
- Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional guna menilai angka kredit pejabat fungsional untuk peningkatan kepangkatan dan jenjang auditor.
- Pelatihan fisik dan kerjasama tim.

(2) Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi dan profesional aparatur. Pada tahun 2014 untuk meningkatkan kompetensi aparatur, Inspektorat Kota Palembang mengirim sebanyak 35 pegawai/pejabat fungsional untuk mengikuti diklat pembentukan dan diklat teknis yang diadakan oleh pusat pembinaan jabatan fungsional maupun lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatatur pengawasan.

3) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui sub program/kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Indikator kegiatan ini telah memenuhi target dimana Inspektorat Kota Palembang di tahun 2014 telah menerbitkan/menyusun pedoman/kebijakan evaluasi pengawasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

4) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui sub program/kegiatan Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dalam pelaksanaannya inspektorat telah membentuk Unit Layanan pengaduan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan penanganan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. Dari 30 pengaduan masyarakat, telah ditindaklanjuti ndan di laporkan ke atasan setiap bulannya.

3.3 Analisa Capaian Kinerja

Inspektorat kota Palembang telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Inspektorat kota Palembang.

Pencapaian Indikator kinerja sasaran kota Palembang terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang ditetapkan, masing-masing pencapaian Indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capaian sasaran Pertama

Capaian sasaran pertama dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2013			S
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	
1 Terwujudnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna	1 Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan	%	5	6,2	125	-	-	-	-
	2 Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu	orang	3	6	133%	-	-	-	-

Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

1) Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan.

Pengukuran rasio peningkatan jenjang sertifikasi pengawasan, diukur dari jumlah pegawai/pejabat fungsional yang memiliki peningkatan sertifikasi jabatan fungsional dibandingkan jumlah seluruh pejabat fungsional.

Inspektorat Kota Palembang memiliki 32 pejabat fungsional yang terdiri dari pejabat fungsional auditor dan pejabat Fungsional P2UPD. Guna pencapaian kinerja sekaligus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pejabat fungsional melalui program Peningkatan Profesional Tenaga Permeriksa dan aparatur, secara berkala mengirimkan pegawai khususnya Pejabat fungsional untuk

mengikuti diklat pengawasan yang diselenggarakan oleh pusat pembinaan jabatan fungsional baik fungsional auditor maupun fungsional P2UPD serta ujian sertifikasi jabatan fungsional, sehingga dalam pelaksanaan tugas aparatur pengawasan dapat melaksanakan tugas secara profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada instansi pemerintah.

Pada tahun 2014, telah diutus sebanyak 33 pegawai/pejabat fungsional mengikuti diklat teknis pengawasan dan 7 orang diklat pembentukan auditor. Dari 26 orang pegawai dimaksud, 2 orang memenuhi syarat peningkatan kelas jabatan fungsional. Realisasi indikator kinerja sebesar 6,25% dari target 5% dengan capaian kinerja sebesar 125%.

Proses penjenjangan sertifikasi pejabat fungsional dilaksanakan melalui mekanisme diklat dan dilanjutkan dengan ujian. Pelaksanaan Ujian diperuntukan bagi pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat penjenjangan jabatan fungsional.

2) Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu.

Pengukuran indikator kinerja ini diukur melalui pengiriman pegawai mengikuti diklat khusus untuk keahlian tertentu.

Pada tahun 2014 telah di tugaskan 33 pegawai/pejabat fungsional diantaranya sebanyak 4 orang mengikuti diklat keahlian tertentu yaitu diklat Subtansi Audit Investigasi dan Evaluasi LAKIP.

Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target dari 3 orang yang diharapkan memiliki keahlian tertentu ternyata terealisasi 4 orang yang memiliki keahlian tertentu, dengan capaian kinerja sebesar 133%

b. Capaian sasaran Kedua

Capaian sasaran Kedua dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel E.2.1.
Capaian sasaran Kedua

SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2013			S	
			T (%)	R (%)	C (%)	T (%)	R (%)	C (%)		
1 Terciptanya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang	1	Persentase LHP yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	-	-	-	-
	2	Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas	%	80	77,82	97,25	-	70,32	-	-
	3	Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti	%	90	100	111,11	-	100	-	-
	4	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	5	Persentase unit kerja dengan pelayanan baik	%	50	50	100	-	-	-	-
	6	Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP	%	40	-	-	-	-	-	-
	7	Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang	Kategori	B	CC	CC	CC	CC	CC	-
	8	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	%	30	19	63,83	-	-	-	-
	9	Nilai PMPRB	Kategori	B	B	B	-	-	-	-
	10	Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	-

1) Persentase LHP yang disusun tepat waktu

Pengukuran indikator persentase LHP yang disusun tepat waktu dilakukan dengan membandingkan LHP yang seharusnya diterbitkan dari surat penugasan audit operasional dan audit tujuan tertentu/kasus tepat waktu dengan LHP yang telah diterbitkan.

Tahun 2014 Realisasi indikator ini sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2013 ini juga memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Setiap penugasan audit penyusunan laporan hasil audit diterbitkan tepat waktu, di tahun 2014 inspektorat telah menerbitkan sebanyak 240 LHP.

2) Rasio temuan BPK-RI yang ditindaklanjuti.

Rasio ini didapat dari perbandingan/ rasio jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan sampai akhir tahun lalu.

Sampai dengan Tahun 2014 jumlah temuan BPK di Pemerintah Kota Palembang sebanyak 389 temuan dan 853 Rekomendasi dengan nilai setor ke kas Daerah sebesar Rp46.078.457.465,82. Terhadap temuan BPK tersebut Inspektorat Kota Palembang telah menindaklanjutinya secara intensif yang hasilnya sebanyak 656 Rekomendasi dengan nilai setor ke kas daerah sebesar Rp24.236.355.551,31 telah ditindaklanjuti secara tuntas, dan sebanyak 234 rekomendasi dengan nilai setor Rp21.207.790.893.01 masih dalam proses tindaklanjut. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 77,82%. Namun demikian untuk tindak lanjut secara administrasi telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Realisasi kinerja indikator ini meningkat sebesar 7,49 % dari tahun 2013 yakni pada tahun 2013 BPK di Pemerintah Kota Palembang adalah sebanyak 338 temuan dengan 731 Rekomendasi dengan nilai untuk setor ke kas Daerah sebesar Rp68.174.958.324,07. Dengan hasil tindaklanjut sebanyak 517 Rekomendasi dengan nilai setor ke kas daerah sebesar Rp14.001.103.575,97 telah ditindaklanjuti secara tuntas, dan sebanyak 215 rekomendasi

dengan nilai setor Rp26.948.970.333,81 masih dalam proses tindaklanjut.

Indikator ini belum mencapai target kinerja yang ditetapkan dikarenakan kurangnya pemahaman dan respon dari pihak terkait khususnya pihak rekanan untuk menindaklanjuti temuan dimaksud.

Untuk Peningkatan Pencapaian Kinerja, Inspektorat Kota Palembang akan melakukan pemantauan lebih intensif agar di tahun 2018 temuan BPK telah ditindaklanjuti 100% secara tuntas.

3) Rasio temuan APIP yang ditindaklanjuti.

Didapat dari perbandingan/ rasio jumlah temuan APIP yang dilakukan evaluasi jumlah temuan sampai akhir tahun lalu. Capaian Indikator kinerja 111,1 % dari target 90% terealisasi 100%.

Dalam pencapaian indikator ini, kami telah melakukan Audit berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerbitkan 141 LHP Audit Operasional dan 100 LHP Audit Tujuan tertentu dengan Jumlah temuan audit yang mengakibatkan Kerugian Daerah dan Negara pada SKPD di Pemerintah Kota Palembang sebanyak 61 temuan dengan nilai setor kerugian daerah sebesar Rp3.911.811.167,00 dan kerugian Negara sebesar Rp148.227.055,00.

Dari hasil temuan tersebut kami secara intensif melakukan pembinaan dan koordinasi kepada instansi terkait untuk pelaksanaan tindak lanjutnya dan sampai dengan desember 2014 seluruh temuan telah ditindak lanjuti.

Tercapainya target ini dikarenakan pada saat pengawasan tim Inspektorat Kota Palembang memberikan pembinaan secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara administrasi maupun teknis guna perbaikan instansi/unit kerja di tahun mendatang.

4) Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Opini BPK atas Laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan empat

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang disampaikan kepada BPK RI, Inspektorat kota Palembang telah melakukan revidu atas laporan keuangan guna memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sudah sesuai dengan SAP.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Palembang kembali menerima penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2013. Penghargaan Opini WTP tahun ini merupakan yang keempat kali secara berturut-turut di terima oleh Pemerintah Kota Palembang.

Pencapaian Indikator kinerja ini merupakan usaha bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan untuk kedepan Inspektorat akan terus berperan aktif untuk dapat menjaga opini WTP atas laporan keuangan Pemkot Palembang.

5) Persentase unit kerja dengan pelayanan baik.

Pengukuran kinerja persentase unit kerja dengan pelayanan baik didapat dari jumlah unit kerja yang bernilai baik dengan jumlah unit kerja pelayanan publik unit.

Pada tahun 2014 juga Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan melakukan evaluasi pelayanan publik terhadap 18 unit kerja pelayanan publik yang hasilnya terdapat 18 unit kerja pelayanan tersebut berpredikat baik. Dengan demikian realisasi indikator kinerja ini sebesar 50% memenuhi target kerja yang ditetapkan sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2013 indikator ini belum menjadi target kinerja pencapaian organisasi.

Pencapaian kinerja ini dapat dicapai dikarenakan Inspektorat melakukan Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik terhadap

13 unit kerja dari 36 unit kerja pelayanan, untuk mengetahui kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari hasil pembinaan dan evaluasi terhadap 13 unit pelayanan publik, seluruh unit pelayanan masuk dalam Zona Hijau/Baik, ini berarti seluruh unit pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6) Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP.

Indikator kinerja ini belum dapat diukur dikarenakan belum adanya pedoman/petunjuk teknis evaluasi pelaksanaan SPIP pada instansi pemerintah.

7) Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang.

Pengukuran kinerja Skor Evaluasi LAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Pada tahun 2014 skor evaluasi LAKIP Pemkot Palembang mendapatkan kategori CC sama seperti tahun sebelumnya. Belum tercapainya target skor B untuk Evaluasi LAKIP dari Kementerian PAN dan RB dikarenakan masih belum selarasnya dokumen perencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Palembang.

Untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun mendatang Inspektorat Kota Palembang telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Bappeda Kota Palembang dan Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang mengenai dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sehingga seluruh dokumen kinerja dapat selaras dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan.

8) Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC.

Pengukuran kinerja Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC di dapat dengan membanding jumlah unit kerja yang mendapatkan kategori CC dengan total jumlah unit kerja.

Dalam hal pengukuran kinerja ini, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja di lingkungan Pemkot Palembang, dari hasil evaluasi didapat sebanyak 9 unit kerja yang mendapatkan nilai/kategori CC keatas, dari 47 unit kerja yang dilakukan evaluasi.

Dengan demikian realisasi indikator kinerja sebesar 19 % dari target 30%. Masih belum tercapainya indikator ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman aparatur dan pimpinan unit kerja mengenai dokumen akuntabilitas kinerja sehingga dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja belum memiliki sasaran dan indikator kinerja yang baik.

Guna pencapaian kinerja di tahun berikutnya, inspektorat kota Palembang telah memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk ditindaklanjuti serta inspektorat Palembang akan melakukan pembinaan secara intensif dalam penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja.

9) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pengukuran kinerja nilai PMPRB didapat dari Penilaian dan disampaikan secara online pada website www.pmprb.menpan.go.id yang selanjutnya akan dievaluasi oleh kementerian PAN dan RB.

Inspektorat Kota Palembang telah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2013 dengan kategori nilai B.

10) Rasio Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat didapat dari perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Tahun 2014.

Jumlah pengaduan masyarakat adalah laporan/pengaduan yang bersumber dari masyarakat langsung dan sumber dari instansi lain serta pihak atasan.

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan koordinasi dengan

instansi terkait. Pada Tahun 2014 pengaduan yang masuk berjumlah 20 pengaduan, yaitu 6 pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan 14 Pengaduan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Sehingga penyelesaian pengaduan masyarakat di Tahun 2014 sebanyak 20 pengaduan telah ditindaklanjuti.

3.4 Penggunaan Sumber daya

Dalam Pelaksanaan kegiatan di tahun 2014 untuk mencapai tujuan dan sasaran Sumber Daya yang di gunakan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kekuatan Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Palembang per 31 Desember 2014 berjumlah 51 orang yang terdiri dari 45 orang PNS dan 5 orang tenaga Non PNSD, 46 orang PNS tersebut berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Berdasarkan golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	1	1	2
II	-	1	1	1	2
III	7	3	9	9	30
IV	8	3	1	-	12
Jumlah					46

b. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	2
3	Eselon IV a	-
4	Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	32
5	Staf	11
Jumlah		46

c. Berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S 2	16
3	S 1/D IV	27
4	SLTA	-
5	SLTP	1
5	SD	1
Jumlah		46

2. Alokasi dan Realisasi Keuangan

Dukungan keuangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel C.1
Anggaran dan Realisasi Keuangan

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Selisih	%
2	BELANJA	9.053.597.000,00	8.703.119.478,00	96,13	350.477.522,00	3,87
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.445.397.000,00	4.400.202.360,00	98,98	45.194.640,00	1,02
2.1.1	Belanja Pegawai	4.445.397.000,00	4.400.202.360,00	98,98	45.194.640,00	1,02
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.608.200.000,00	4.302.917.118,00	93,38	305.282.882,00	6,62
2.2.1	Belanja Pegawai	346.200.000	276.826.100,00	79,96	69.373.900,00	20,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.617.530.000	3.408.297.318,00	94,22	209.232.682,00	5,78
2.2.3	Belanja Modal	644.470.000	617.793.700,00	95,86	26.676.300,00	4,14

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Pelaksanaan tugas alokasi belanja dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran tahun 2014 adalah Belanja Langsung sebesar Rp3.792.742.000,00, dengan dana APBDP yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja ditetapkan sebesar Rp1.916.340.000,00 dengan realisasi Rp1.863.493.336,00. Dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Capaian Sasaran
Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	
1		2	3	4	5	6	7	8	
1,1	Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan	5%	6%	125%	1	Program Peningkatan Profesional Tenaga Permeriksa dan aparat	315.830.000	278.200.310	88,09
1,2	Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu	3 orang	4 orang	133%	2	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	25.000.000	18.000.000	72,00

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya profesional aparat pengawasan berdayaguna dan berhasilguna pada tabel diatas menunjukkan peningkatan capaian kinerja yang baik yang dilaksanakan melalui :

- a. Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dengan anggaran sebesar Rp315.830.000,00 terealisasi sebesar Rp278.200.310,00 capaian keuangan program ini sebesar 88,09%, belum terealisasinya keuangan secara menyeluruh dikarenakan adanya perubahan jadwal dalam pemanggilan pelatihan teknis pengawasan oleh pusat pelatihan dan pengembangan aparat pengawasan BPKP dan Depdagri, sehingga ada beberapa pegawai yang tidak di panggil mengikuti diklat, dan adanya jadwal pelaksanaan pelatihan kantor sendiri yang tidak terlaksana dikarenakan beban tugas pengawasan yang memakan waktu.
- b. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan anggaran Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 dengan capaian keuangan program sebesar 72%, belum terealisasinya keuangan secara menyeluruh diakrenakan kelebihan penganggaran.

Tabel 3.5.2
Capaian Sasaran
Terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif,
efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2		3			4	5	6	7
2,1	Persentase LHP yang disusun tepat waktu	100	100	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.535.350.000	2.373.259.300	93,61
2,2	Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas	80	77,82	97,25				
2,3	Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti	90	100	111				
2,4	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	WTP				
2,5	Persentase unit kerja dengan pelayanan baik	50	50	100				
2,6	Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP	40	-	-	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	65.000.000	60.000.000	92,37
2,7	Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang	B	B	B				
2,8	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	30	19	64				
2,9	Nilai PMPRB	B	B	B				
2,10	Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100	100				

Dalam pencapaian sasaran Terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang pada tabel diatas menunjukkan peningkatan capaian kinerja yang baik yang dilaksanakan melalui :

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp2.535.350.000,00 terealisasi sebesar Rp2.373.259.300,00 capaian keuangan program ini sebesar 88,09%, belum terealisasinya keuangan secara menyeluruh dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan pemantauan yang tidak teralisasi.

- b.** Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 capaian keuangan program ini sebesar 88,09%, belum terealisasinya keuangan secara menyeluruh dikarenakan adanya penghematan dalam belanja cetak dan belanja ATK.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 adalah berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis pencapaian strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman rumusan sasaran yang didukung indikator setingkat outcome. Pengukuran kinerja inspektorat diukur dengan 2 (dua) sasaran yang didukung dengan 12 indikator sasaran serta 4 (empat) program utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Palembang sebagian besar telah menunjukkan hasil optimal dengan 8 indikator kinerja telah mencapai target dan masih terdapat 4 indikator yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Sasaran strategik "*meningkatnya profesional aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna*", dengan indikator kinerja yaitu :
 - (1) Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan, capaian kinerjanya sebesar 125%.
 - (2) Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu, capaian kinerjanya sebesar 133%.

2. Sasaran strategik "terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel di pemerintah kota Palembang" dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase LHP yang disusun tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - b. Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - c. Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, dengan capaian kinerja sebesar 100%

- e. Persentase unit kerja dengan pelayanan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- f. Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP, belum dapat diukur
- g. Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang, dengan capaian kinerja CC
- h. Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC, dengan capaian kinerja sebesar 64%
- i. Nilai PMPRB, dengan capaian kinerja B
- j. Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Lampiran I
Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1		2		3	4		5
1	Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna	1,1	Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan	5%	1	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pereriksa dan aparatur	324.000.000
					1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	124.000.000
		1,2	Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu	6 orang	2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	200.000.000
2	Terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang	2,1	Persentase LHP yang disusun tepat waktu	100%	3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH	3.306.100.000
		2,2	Persentase Temuan/Rekomen dari hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas	80%	1	Pengawasan Internal secara berkala	1.897.500.000
		2,3	Persentase Temuan APIP yang ditindak lanjuti	90%	2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	414.000.000
		2,4	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	3	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	309.600.000
		2,5	Persentase unit kerja dengan pelayanan baik	50%	4	Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komperhensif	685.000.000
		2,6	Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP	40%	4	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	65.000.000
		2,7	Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang	B	1	Pengaduan masyarakat yang ditindak	65.000.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1		2		3	4		5
		2,8	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	30%		lanjuti	
		2,9	Nilai PMPRB	B			
		2.10	Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani	100%			

Lampiran 2
Pencapaian Program dan Kegiatan

Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Satuan	Tahun 2014		Keuangan	
							target	Realisasi	Target	Realisasi
1			2	3		4	(8)	(9)	(10)	(11)
20	01	21	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan		%			Rp 290.830.000	Rp 260.200.310
				Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu		orang				
20	01	21	01 Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Output	Jumlah Aparatur yang mengikuti penjenjangan Jabatan fungsional Auditor dan P2UPD	orang	50	50	Rp 76.000.000	Rp 61.407.000
				Outcome	Jumlah Auditor/P2UPD peningkatan jenjang auditor	orang	50	50		
20	01	21	02 Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas	Output	Jumlah auditor/P2UPD/aparatur yang mengikuti diklat teknis	orang	35	32	Rp 214.830.000	Rp 198.793.310
				Outcome	Jumlah auditor/P2UPD/aparatur yang memiliki keahlian tertentu	orang	35	32		
20	01	22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**		pedoman/kebijakan			Rp 25.000.000	Rp 18.000.000
20	01	22	02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Output	Kibijakan sistem dan prosedur pengawasan	kebijakan/pedoman	1	1	Rp 25.000.000	Rp 18.000.000
				Opome	Pedoman pelaksanaan pengawasan bagi aparatur	kebijakan/pedoman	1	1		
20	01	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI					Rp 2.535.350.000	Rp 2.363.259.300
				Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang						

Lakip Itko Tahun 2014

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Satuan	Tahun 2014		Keuangan	
								target	Realisasi	Target	Realisasi
1				2	3		4	(8)	(9)	(10)	(11)
20	01	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Output	Jumlah LHP Audit Operasional	LHP	149	216	Rp 1.862.145.000	Rp 1.736.267.500
					Outcome	Jumlah Laporan Hasil audit operasional/Kegiatan yang ditindak lanjuti	LHP	149	216		
20	01	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	Output	Jumlah LHP Khusus/Kasus/Tujuan tertentu	LHP/laporan	36	30	Rp 451.090.000	Rp 443.182.000
					Outcome	Jumlah LHP Khusus/Kasus/Tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	LHP/laporan	36	30		
20	01	20	06	Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan	Output	Jumlah LHP Pemantuan	LHP	37	10	Rp 151.900.000	Rp 124.326.000
					Outcome	Persentase Temuan Aparat Pengawas Yang ditindak lanjuti	%	80	77		
20	01	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Output	Jumlah Laporan pelaksanaan tugas	laporan	4	2	Rp 70.215.000	Rp 59.483.800
					Outcome	Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan informasi dan kebijakan	laporan	4	2		
20	01	24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		%			Rp 65.000.000	Rp 60.000.000
20	01	24	01	Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Output	Tim Dumas Inspektorat	tim	1	1	Rp 65.000.000	Rp 60.000.000
					Outcome	Jumlah Laporan Pelayanan dan Penanganan Penagaduan Masyarakat	laporan	12	12		
Total Anggaran										Rp 2.916.180.000	Rp 2.701.459.610

Lampiran 3
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1		2		3			4		5	6	7
1	Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna	1,1	Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan	5%	6%	125%	1	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan aparatur	315.830.000	278.200.310	88,09
							1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	76.000.000	61.407.000	80,80
		1,2	Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu	3 orang	4 orang	133%	2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	214.830.000	198.793.310	92,54
							2	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	25.000.000	18.000.000	72,00
							1	Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	25.000.000	18.000.000	72,00
2	Terlaksananya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efisien dan	2,1	Persentase LHP yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH	2.535.350.000	2.373.259.300	93,61

Lakip Itko Tahun 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3				4		5	6	7
akuntabel di Pemerintah Kota Palembang	2,2	Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas	80%	77,82 %	97,25 %		1	Pengawasan Internal secara berkala	1.862.145.000	1.736.267.500	93,24
	2,3	Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti	90%	100%	111%		2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	451.090.000	443.182.000	98,25
	2,4	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	WTP		3	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	151.900.000	124.326.000	81,85
	2,5	Persentase unit kerja dengan pelayanan baik	50%	50%	100%		4	Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komperhensif	70.215.000	69.483.800	98,96
	2,6	Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP	40%	-	-	4	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	65.000.000	60.000.000	100,00	
	2,7	Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang	B	B	B		1	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65.000.000	60.000.000	93
	2,8	Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC	30%	19%	64%						
	2,9	Nilai PMPRB	B	B	B						
	2.10	Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%						

